

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *New Public Management* (NPM)

New public management atau NPM didefinisikan sebagai sebuah konsep manajemen publik/pemerintahan baru, yang menerapkan praktik kerja sektor privat atau swasta untuk diterapkan pada sektor publik dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Ide utama yang dikemukakan dalam konsep tersebut adalah sektor publik harus berorientasi pasar sehingga terdapat efisiensi biaya yang besar bagi pemerintahan yang dapat memberikan nilai manfaat yang tinggi dari segi anggaran (Indrawati, 2010).

Penerapan konsep *new public management* atau praktek manajemen publik yang baru dimaksudkan untuk melakukan pengembangan inovatif terhadap sistem pelayanan masyarakat khususnya di bidang pencatatan terkeit kepentingan adminsitratif dengan tujuan peningkatan produktifitas dan kinerja dari instansi publik. *New public management* direalisasikan melalui penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang diterapkan oleh pemerintah sebagai pengganti dari sistem akuntansi berbasis kas yang dianggap kurang optimal dalam memberikan penjabaran mengenai realisasi transaksi dana publik yang dilakukan.

Dengan adanya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual maka nilai transaksi yang dilakukan menjadi lebih transparan dan akuntabel bagi pihak publik maupun SKPD itu sendiri. Manajemen publik yang sebelumnya menaruh perhatian pada masalah anggaran dan personil telah berkembang bersama teknologi informasi dan kini mencakup sistem pengambilan keputusan, sistem perencanaan, sistem pengendalian, pengawasan, dan berbagai aspek lainnya dimana hal ini menjadi dasar dari munculnya konsepsi *new public management* (NPM) (Alamsyah, 2016).

Transisi sistem pengelolaan sebagaimana yang diimplementasikan pada implementasi NPM didasari tiga pdanangan ilmu ekonomi yaitu, *agency theory*

(teori keagenan), *public choice theory* (teori pilihan publik) dan *transaction cost economics* (transisi biaya ekonomis). Teori pilihan publik merujuk pada kebijakan pengelolaan yang perlu ditetapkan demi terpenuhinya pelayanan terkait kepentingan publik yang lebih baik. Teori keagenan merujuk pada pemilihan sdm terbaik yang akan diberikan tugas melakukan pengelolaan pada suatu organisasi dalam hal ini adalah lembaga pemerintah khususnya yang bekerja di bidang keuangan. Transisi biaya ekonomis merujuk mengenai suatu pengelolaan yang lebih optimal baik dari segi biaya maupun kinerja yang dihasilkan.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban dari kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah entitas. Laporan keuangan menurut PSAK No.1 “Laporan keuangan adalah penyajian tersruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”⁸. Laporan ini menyajikan perjalanan sejarah sebuah entitas yang dikualifikasikan dalam nilai moneter. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain.

Penyusun Laporan keuangan harus memiliki kemampuan untuk menyajikan secara jelas dan transparan mengenai kesehatan keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberikan sebuah keputusan bisnis yang informatif. Sehingga tidak boleh ada kecurangan didalam penyusunan sebuah laporan keuangan suatu perusahaan. Manajemen perusahaan sangat membutuhkan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan maupun menyusun sebuah perencanaan. Itulah mengapa sebuah perusahaan harus berusaha untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Tjiptono “Kualitas laporan keuangan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi (Tjiptono, Fandy 2004;13).

Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan

keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh transparansi informasi keuangan, belanja modal, kesehatan keuangan dan ukuran pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah erat kaitannya dengan pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit pemerintah daerah. Sejak Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua berlaku di tahun 2015, perkembangan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (BPK RI, 2021). Di satu sisi, terdapat pencapaian peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di mana laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK sebanyak 70% di tahun 2016 dan meningkat menjadi 90% di tahun 2020 (BPK RI, 2021). Di sisi lain, masih terdapat pemerintah daerah yang belum memperoleh opini tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum semua laporan keuangan saat ini disajikan dengan baik. Adanya laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki opini selain wajar tanpa pengecualian terjadi akibat ketidaksesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.

Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat diakibatkan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang kurang baik dapat menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal kualitas laporan keuangan yang baik diharapkan oleh masyarakat untuk dapat menilai kinerja atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan kinerja keuangan yang baik dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat menyeimbangkan kepentingan

masyarakat. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang kurang baik mengakibatkan informasi yang disajikan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Yuniar, 2022).

Kualitas laporan keuangan erat kaitannya dengan penyajian yang dilakukan oleh penyusun laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan tidak dapat ditelusuri bukti transaksinya dapat berakibat rendahnya kualitas laporan keuangan. Selain itu, terdapat kebijakan-kebijakan akrual dari pimpinan instansi yang tidak terdapat bukti akrualnya seperti penyusutan aset, cadangan kerugian piutang, perubahan metode pencatatan persediaan yang juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik menunjukkan pimpinan organisasi memiliki itikad baik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Sebaliknya, kualitas laporan keuangan yang rendah dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Ulasan atas kualitas laporan keuangan khususnya pada level pemerintah daerah masih menjadi isu yang menarik untuk diulas, sehingga penelitian atas pengujian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu diinvestigasi lebih lanjut (Fanani, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah No,71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam standar akuntansi terdapat beberapa butir karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna maupun dapat dikatakan berkualitas, yaitu:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini adalah pemakai diasumsikan sudah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta memiliki kemauan untuk terus mempelajari informasi secara berangsur.

b. Relevan

Informasi harus relevan agar memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan apabila mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Andal

Informasi dikatakan andal bila informasi itu bebas dari pengertian yang menyesatkan, memiliki kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan.

d. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintahan adalah transparansi. Karena dalam menunjang terjadinya otonomi daerah yang baik diperlukan transparansi penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari berbagai kecurangan dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan, selain itu transparansi laporan keuangan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat (Dian, 2018).

Selain itu akuntabilitas dan juga sistem akuntansi berperan penting terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas sendiri dapat diukur dari sejumlah dimensi yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian dan kemampuan responsivitas. Sedangkan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan landasan sistem akuntansi yang mengakui transaksi maupun pencatatan lainnya pada saat hal tersebut terjadi, sehingga transaksi yang dilakukan dicatat serta diakui dalam

laporan keuangan pada periode waktu yang bersangkutan.

2.3 Akuntabilitas

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018:45) adalah:

Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Rizal, et al (2018) pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat,
2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
3. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
4. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
5. adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya

pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Disamping itu pola pertanggungjawaban (akuntabilitas) harus meliputi hal sebagai berikut (Wulandari, 2017):

1. Integritas Keuangan.
2. Pengungkapan.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar–benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Indra, 2018).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah.

Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (LAN, 2017).

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya.

2.3.1 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:70) menjelaskan tingkatan akuntabilitas di dalam organisasi publik dapat dinilai menggunakan 4 indikator penting antara lain:

1. Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan

Anggaran yang dikeluarkan pihak instansi publik harus mampu memenuhi prinsip akuntabel yaitu setiap anggaran yang dikeluarkan tertulis secara benar dan sesuai dengan kenyataan.

2. Pertanggungjawaban kinerja

Hasil pengelolaan anggaran akan dilakukan koreksi oleh pihak-pihak berkepentingan sehingga pihak pengelola harus bersedia menjelaskan segala pencatatan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

3. Analisis kesalahan pencatatan

Penyimpangan maupun kesalahan dapat terjadi di dalam setiap tindakan pencatatan anggaran maupun alokasi dana instansi. Semakin kecil intensitas penyimpangan anggaran maupun kesalahan penulisan anggaran yang terjadi mengindikasikan nilai akuntabilitas yang semakin tinggi.

4. Upaya tindak lanjut kesalahan pencatatan dan penyimpangan

Upaya tindak lanjut terkait adanya penyimpangan anggaran maupun kesalahan penulisan menjadi indikasi penting dari nilai akuntabilitas pelaporan anggaran di dalam instansi publik. Semakin tegas upaya tindak lanjut dari penyimpangan anggaran maupun kesalahan yang

diakibatkan kesengajaan maupun ketidaksengajaan pihak-pihak terkait mengindikasikan realisasi akuntabilitas atas pelaporan instansi publik yang semakin optimal.

2.4 Transparasi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga– lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Tomuka, 2018).

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut (Istiqomah, 2017) :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan–kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009).

2.4.1 Indikator Transparansi

Studi oleh Fahril et al (2014) serta Benawan et al (2018) menjelaskan bahwa dalam mengukur nilai transparansi pelaporan anggaran instansi publik terdapat 4 indikator yang dapat digunakan antara lain:

1. Kemudahan akses informasi publik

Akses informasi yang menyangkut kepentingan publik harus mudah diakses untuk membantu masyarakat mengetahui arah aliran dana serta alokasi anggaran yang dikeluarkan.

2. Pembaruan informasi pencatatan berkelanjutan

Pembaruan informasi dilakukan untuk meningkatkan nilai ketepatan atas informasi aliran anggaran yang dikeluarkan sehingga tingkat transparansi informasi menjadi semakin tinggi

3. Penyediaan informasi yang jelas tentang program kerja dan biaya

Informasi yang dipublikasikan dijabarkan secara lengkap mencakup nilai anggaran yang dikeluarkan serta program kerja yang ditetapkan.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa

Kerjasama dengan media massa dimaksudkan untuk meningkatkan nilai transparansi untuk memperoleh pengawasan publik yang optimal.

2.5 Sistem Akuntansi Berbasis Akrua

Sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan implementasi dari diterapkannya konsep *new public management* yang dimaksudkan untuk melakukan efisiensi dan perbaikan pelayanan instansi publik. Diterapkannya sistem akuntansi ini juga didasarkan atas peraturan pemerintah (PP) No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis *Cash Towar Accrual* yang kemudian diikuti dengan lahirnya PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Kristiawati, 2017).

Kristiawati (2017) mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dandisajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual menurut Wahyudi (2019) merupakan pencatatan transaksi pada saat peristiwa terjadi dalam periode akuntansi yang dapat merubah posisi keuangan perusahaan secara langsung. Sistem akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintahan merupakan suatu konsepsi penulisan basis

akuntansi yang didasarkan pada penulisan akuntansi pada sektor privat atau swasta. Hal ini dikarenakan penulisan sistem akuntansi menggunakan basis swasta dinilai lebih baik oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja instansinya (Hassan, 2015).

Lamonisi (2016) mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) yaitu standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada instansi pemerintah dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dan dituliskan di dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas dibayarkan dengan tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja instansi.

2.5.1 Indikator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Indriasih (2020:134) untuk mengukur nilai implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat didasarkan atas 4 indikator antara lain:

1. Pengakuan pendapatan
Pengakuan nilai pendapatan didasarkan pada laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.
2. Pengakuan beban dan belanja
Nilai pengakuan beban dan belanja diukur berdasarkan jumlah beban dan nilai belanja periodik yang dikeluarkan pihak instansi.
3. Pengakuan persediaan
Nilai pengakuan persediaan diukur berdasarkan nilai persediaan yang dimiliki pihak instansi pada periode penulisan pelaporan.
4. Pengakuan aset tetap
Nilai pengakuan aset tetap diukur berdasarkan nilai aset terkini serta

tingkat depresiasi asset.

5. Pengakuan kewajiban dan ekuitas

Nilai kewajiban dan ekuitas diukur berdasarkan jumlah kewajiban dan ekuitas instansi pada periode penulisan laporan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel digunakan	Hasil Penelitian
1.	Hamsinar (2017)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen : -Partisipasi Masyarakat -Akuntabilitas -Transparansi Kebijakan Publik Variabel Dependen : -Kualitas Laporan Keuangan Variabel Moderasi : -Sistem Pengendalian Intern	1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan

				<p>menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
2.	Tika Septiningtyas (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Akuntabilitas -Transparansi -Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan -Sistem Pengendalian Internal <p>Variabel</p>	<p>Dari hasil penelitian terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kendal diperoleh kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>1. Akuntabilitas</p>

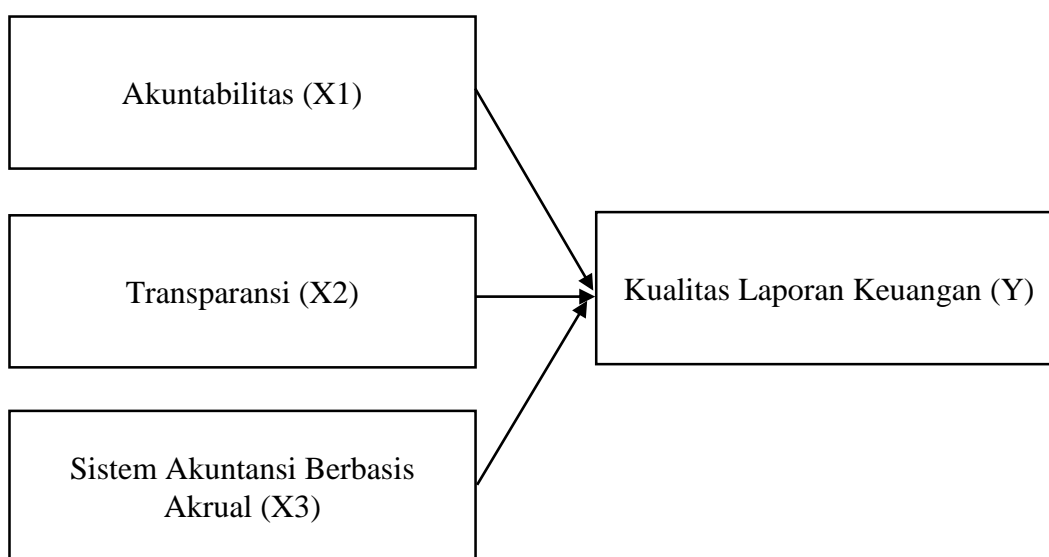
		Pemerintah Daerah	Dependen : -Kualitas Laporan Keuangan	tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada OPD di Kabupaten Kendal. 2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada OPD di Kabupaten Kendal. 3. Pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD pada OPD di Kabupaten Kendal. 4. Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada OPD di Kabupaten Kendal
3.	Arini Kurniawati (2021)	Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi Terhadap Kualitas laporan Keuangan	Variabel Independen : -Akuntabilitas publik -Transparansi Variabel Dependen : -Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan temuan dari hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Farah Faadillah Herindraningrum (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan	Variabel Independen : -Akuntabilitas -Transparansi Variabel Dependen :	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan

		Keuangan Pemerintah Daerah	-Kualitas Laporan Keuangan	keuangan.pemerintah daerah
5.	Andita Cahyasari, Fajar Syaiful (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya	Variabel Independen : -Akuntabilitas -Transparansi -Kompetensi SDM Variabel Dependen : -Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan namun kompetensi SDM berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
6.	Rachmat Ivandra, 2022	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Variabel Independen : -Akuntabilitas -Transparansi -Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Variabel Dependen : -Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan sistem akuntansi berbasis akruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.7 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan dasar guna mencegah adanya penyalahgunaan wewenang, serta memastikan wewenang tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan target (Widodo, 2017). Entitas kebijakan publik dalam hal ini ialah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas sikap, perilaku, dan tindakanya terhadap masyarakat dalam melaksanakan kewajiban, fungsi dan wewenangnya.

Akuntabilitas publik dijadikan landasan untuk melaporkan keuangan pemerintah. Akuntabilitas adalah tujuan akhir dari pelaporan keuangan pemerintah dan ada hubungan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan. Pemerintah

yang accountabel memiliki ciri– ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian kurniawati (2021) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.8.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi yang didefinisikan sebagai konsep lanjutan dari sikap keterbukaan instansi pemerintah akan memberikan potensi kepada para pengamat dan para pemangku kepentingan untuk lebih mengetahui aliran dana transaksi yang dilakukan pihak instansi pemerintah sehingga pengeluaran dan penetapan dana atas program kerja yang dilakukan dapat diketahui secara detil oleh para pemangku kepentingan. Implementasi atas penerapan transparansi di dalam laporan akuntansi pemerintah berbasis akrual memberikan nilai positif terhadap semakin teroptimalkannya penulisan pelaporan tersebut karena mampu menjabarkan kejelasan transaksi dari pemasukan maupun pengeluaran dana untuk mewujudkan program kerja pemerintah bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya (Rafii, 2018).

Transparansi menjadi implementasi penting di dalam perwujudan *new public management theory*. Manajemen pengelolaan keuangan publik yang menerapkan prinsip transparansi akan menghindarkan persepsi-persepsi dan sikap skeptis

negatif masyarakat terhadap instansi pemerintah dimana hal ini sejalan dengan *public choice theory* atau teori pilihan publik yang merupakan bagian dari unsur *NPM theory* dimana dalam sub teori ini menjelaskan bahwa masyarakat akan mempercayai instansi pemerintah yang mampu memenuhi harapan dan memberikan pelayanan terbaik sehingga menjadi pilihan masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Kurniawati (2021) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H2: Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.8.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintah berbasis akruaL didefinisikan sebagai perwujudan dari konsep *new public management* dimana sistem akuntansi ini dimaksudkan untuk melakukan efisiensi pencatatan serta pelayanan akuntansi publik sehingga hasil pelaporan keuangan menjadi semakin optimal yang mencakup beragam pencatatan transaksi secara jelas dan detail. Implementasi sistem akuntansi berbasis akruaL ini diterapkan dengan mengutamakan penulisan transaksi keuangan yang dilakukan dengan cepat dan dilakukan ketika transaksi itu terjadi tanpa memperhatikan nilai setara kas sehingga pencatatan yang dilakukan lebih efisien dan berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah yang diperoleh.

Penerapan sistem akuntansi akruaL di dalam pelaporan keuangan instansi ini juga merupakan ketetapan pemerintah resmi dari teori *NPM* serta diimplementasikan sebagai langkah realisasi sistem akuntansi sebagaimana yang tertulis pada PP No 71 tahun 2010 mengenai penulisan standar akuntansi publik (Handayani et al, 2020). Adanya penerapan SAP berbasis akruaL ini akan mendorong pencatatan transaksi dana yang semakin efisien, cepat detil serta akuntabel sesuai dengan prinsip teori

NPM sehingga nilai kualitas pelaporan keuangan menjadi semakin baik.

Hal ini juga didukung oleh penelitian rachmat (2022) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H3: Sistem akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

